

STRATEGI LANTAMAL II PADANG DALAM MENGAMANKAN OBYEK VITAL NASIONAL DI WILAYAH PERAIRAN SELATAN SUMATERA BARAT, STUDI KASUS PELABUHAN TELUK BAYUR

STRATEGY OF LANTAMAL II PADANG IN SECURING NATIONAL VITAL OBJECT INSIDE SOUTHERN SEA AREAS OF WEST SUMATERA, CASE STUDY TELUK BAYUR PORT

Prima Tegar Anugrah¹, Siswo Hadi Sumantri², Panji Suwarno³

Universitas Pertahanan
(justpta@gmail.com)

Abstrak - Indonesia mempunyai 4 *choke points* (selat sempit) perdagangan laut dunia. Posisi Indonesia berada di posisi silang dunia, di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang mana hal ini membuat laut Indonesia menjadi sangat strategis. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan ujung tombak dalam menentukan kesuksesan pengiriman barang dari daerah sekitar Sumatera Barat ke nusantara dan mancanegara. Pelabuhan ini merupakan gerbang perekonomian Indonesia bagian barat untuk tujuan ekspor ke India serta kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan dan pengamanan pelabuhan secara periodik dan berkala. Beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur yang dikelola oleh PT. Pelindo II, selain merupakan jalur pelayaran dan daerah tangkapan ikan adalah adanya ancaman pelayaran dan ancaman sumber daya di perairan wilayah kerja Lantamal II Padang. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana sesungguhnya strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan pengamanan obyek vital nasional dengan menganalisis kondisi nyata (*existing condition*) dan faktor – faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif yang diperkuat dengan studi kepustakaan dan analisis situasi yang diperoleh dari gambaran dan informasi kejadian. Hasil analisis diketahui bahwa pengamanan Obvitas Pelabuhan Teluk Bayur di perairan Selatan Sumatera Barat oleh Lantamal II Padang masih belum optimal. Faktor penghambat berupa sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana patroli, dan keterbatasan anggaran pengamanan, sedangkan faktor pendukung adalah adanya payung hukum, dukungan dari *stakeholder*, dan budaya positif dari lingkungan masyarakat maritim. Rekomendasi optimalisasi pengamanan dengan metode : rekrutmen, pendidikan, latihan, penugasan, modernisasi, penelitian, dan pengembangan.

Kata Kunci : Strategi, Lantamal II Padang, Pengamanan, Obyek Vital Nasional

Abstract - Indonesia has 4 *choke points* among world sea trade. Indonesia is in the cross position of the world, between the Indian and Pacific Oceans which makes the Indonesian sea becomes very strategic. Teluk Bayur Port is the spearhead in determining the success of goods delivery from the area around West Sumatra to the archipelago and abroad. This port is the gateway of the western Indonesian economy for export destinations to India and the Middle East region. Therefore, periodic management and security in the port is required. Some sets of security problem occurred around Teluk Bayur Port managed by PT. Pelindo II besides being a cruise line and fishing ground are shipping and resources threats. This research try to examine and reveal about the real condition on Strategy of

-
- ¹ Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.
 - ² Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.
 - ³ Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

Lantamal II Padang in securing national vital object through analyse on existing condition and the factors influence it. The research uses qualitative method and descriptive design which was endorsed by literature archive, observation, and also information of the incident. In result, the analysis have informed that Lantamal II Padang efforts of security on the national vital object was not working optimally. The inhibitor factors were human resources, both quantity and quality of patrolling equipments, and budgeting constrain. The advantage factors for instance were : regulations, and the stakeholder's support beside the positive culture of maritime society. Recommendation of optimalization on security such as : recruitment, education, training, assignment, revision, modernization, research, and development.

Keywords: Strategy, Lantamal II Padang, Security, National Vital Object

Pendahuluan

Menurut Geoffrey Till⁴ setidaknya, laut memiliki empat fungsi yaitu : sebagai sumber daya, sarana transportasi, sumber pertukaran informasi dan sarana memperoleh kekuasaan. Data International Maritime Organization⁵ menunjukkan bahwa 90% dari total perdagangan dunia dilaksanakan melalui domain laut. Hal ini disebabkan karena laut merupakan sarana transportasi yang paling murah dibandingkan dengan mode transportasi darat dan udara.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut lebih luas dari daratan, Indonesia mempunyai 4 *choke points* (selat sempit) perdagangan laut dunia. Selain itu posisi Indonesia berada di posisi silang dunia, di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik

yang mana hal ini membuat laut Indonesia menjadi sangat strategis baik bagi pelayaran maupun hasil sumber daya alam. Sehingga diperlukan strategi untuk membangun Indonesia menjadi sebuah negara maritim yang tangguh dan berdaulat.

Obyek Vital Nasional (Obvitnas) adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Obvitnas memiliki peranan penting ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal ini untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obvitnas termasuk aksi terorisme.

⁴ Geoffrey Till, *Seapower: A Guide for 21st Century*, Second Edition, (London : Routledge Publishing, 2009), hlm. 24.

⁵ International Maritime Organization. "Profile", dalam <https://business.un.org/en/entities13> diakses pada 14 Juli 2018.

Pelabuhan Teluk Bayur merupakan salah satu Obvitnas berdasarkan Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 3407 Tahun 2012. Pelabuhan ini telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai Obitnas, antara lain: 1) Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, 2) Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional dan/atau, 3) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pelabuhan Teluk Bayur merupakan ujung tombak dalam menentukan kesuksesan pengiriman barang dari daerah sekitar Sumatera Barat ke nusantara dan mancanegara. Ancaman terhadap keefisienan yang ditimbulkan oleh pengelolaan pelabuhan yang buruk dapat dikategorikan sebagai kajian yang

berdomain di sektor maritim, yaitu sektor ekonomi maritim⁶. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan dan pengamanan pelabuhan secara periodik dan berkala.

Isu keamanan laut yang cukup menonjol dan menjadi perhatian di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat adalah: 1) Ancaman keselamatan pelayaran, berupa kurang terpeliharanya sarana bantu navigasi seperti pelampung suar dan rambu suar⁷, dan 2) Ancaman sumber daya, berupa perusakan dan pencemaran laut beserta ekosistemnya akibat tumpahan minyak⁸. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) merupakan pengamanan inti dalam mengamankan laut Indonesia sesuai dengan Undang – Undang (UU) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lantamal II Padang merupakan pemekaran dari Lanal Kelas B Teluk Bayur, agar kemampuan Lanal dalam mendukung satuan operasi di kawasan strategis ini bisa

⁶ Douglas D., Gary Cutter, & Christopher Bever, “The VHA Multiple Sclerosis Surveillance Registry (MSSR) and it’s Similarities with Other Contemporary MS Cohorts”, *The Journal of Rehabilitation Research and Development*, 2015, 52. 263-272. 10.1682/JRRD.2014.07.0172

⁷ Aliy. “Disnav Teluk Bayur Optimalkan Sarana dan Prasarana Untuk Tingkatkan Kinerja”, dalam beritatrans.com/2016/09/04/disnav-teluk-bayur-optimalkan-saranadan-prasarana-

untuk-tingkatkan-kinerja/ diakses pada 13 Juni 2018.

⁸ Mohamad Amin Madani dan Sapto Andika Candra, “CPO 3 Ribu Ton Tumpah Ke Laut, Teluk Bayur Tercemar”, dalam https://m-republika-coid.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp_version/owzhwm283?amp_js_v=a1&_gsa=1&usqp=mq331AQCCAE=#amp_tf=from%20%251%24s diakses pada 13 Juni 2018.

ditingkatkan untuk menjawab tuntutan kebutuhan pengendalian laut dan peningkatan keamanan. Lantamal II Padang mempunyai beberapa tugas pokok, yaitu: 1) Menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur – unsur satuan dan Komando Utama (Kotama) TNI AL yang beroperasi di wilayahnya, 2) Menyelenggarakan dukungan administrasi, 3) Melaksanakan penegakan hukum, 4) Menjaga keamanan laut, dan 5) Melaksanakan pemberdayaan potensi maritim yang mendukung pertahanan di wilayah kerjanya⁹. Seiring dengan tugas pokok tersebut, Lantamal II Padang juga melaksanakan operasi keamanan laut secara terbatas.

Dari data yang ada gangguan keamanan atau aksi pelanggaran hukum masih terjadi sehingga dianggap mengganggu keselamatan dan keamanan maritim. Tuntutan akan jaminan keamanan di wilayah tersebut seperti disampaikan sebelumnya, masih belum dapat diwujudkan sepenuhnya agar laut bebas dari segala bentuk ancaman, dikarenakan kemampuan yang masih sangat terbatas. Dalam rangka

mewujudkan kondisi stabilitas keamanan laut untuk menjamin integritas wilayah maupun kepentingan nasional di dan atau lewat laut, diperlukan *response* atas adanya ancaman keamanan dalam bentuk upaya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. *Response* yang dimiliki pemerintah untuk menghadapi adanya ancaman keamanan di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat adalah adanya aparat keamanan maritim (Lantamal II Padang).

Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat serta faktor apa saja yang mempengaruhi strategi tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang fenomena yang terjadi

⁹ Agus Sulaeman. “Jaga Fisik Prajurit, Danlantamal II Pimpin Long March”, dalam <https://channelindonesia.com/2017/12/27/jaga-fisik-prajurit-danlantamal-ii-pimpinlong-march/> diakses pada 17 Juni 2018.

mengenai sistem pengamanan terhadap Obvitnas yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang, khususnya pada aspek laut. Menurut Koentjaningrat¹⁰, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya motivasi, perilaku, tindakan, persepsi, dan lain – lain (dll), secara menyeluruh.

Subyek penelitian merupakan tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. Subyek penelitian ini merupakan orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai tujuan atau sasaran¹¹, terutama dalam menjelaskan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas berupa Pelabuhan Teluk Bayur dan area sekitarnya yang berada di perairan Selatan Sumatera Barat serta faktor yang mempengaruhinya. Institusi yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah Lantamal II Padang dan Pelabuhan Teluk Bayur.

Sampel penelitian merupakan obyek permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono¹², obyek penelitian adalah suatu

atribut dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini memiliki sampel penelitian yang terdiri dari para narasumber yang berkompeten dalam menjawab permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif agar dapat diperoleh data yang mendalam, jelas, dan spesifik. Selanjutnya bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, komunikasi personal, dan gabungan/triangulasi.

Pemeriksaan keabsahan data melalui dokumentasi dan referensi selama penelitian. Data – data yang diolah perlu dibuktikan kebenarannya, maka dokumentasi berupa foto, rekaman wawancara, dan histori email (jika ada) merupakan bukti bahwa penelitian ini benar – benar dilakukan. Selanjutnya bahwa pemeriksaan keabsahan data dapat diperoleh dari hasil

¹⁰ Koentjaningrat, *Metode–Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1993), hlm. 89.

¹¹ Arikunto, S., *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012).

gabungan/triangulasi dari metode observasi, dokumentasi, dan komunikasi personal.

Analisis data kualitatif menggunakan tiga jenis teknik¹³, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
- b. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk bagan, catatan lapangan, grafik, jaringan, dan matriks).
- c. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Pembahasan

Aspek Strategi Intelijen

Intelijen strategis adalah pengetahuan yang meliputi kemampuan, kelemahan, atau kerawanan dan kemungkinan cara bertindak suatu negara atau bangsa¹⁴. Selanjutnya bentuk utama intelijen strategis dapat dibedakan menjadi :

- a. *Basic Description Form* (Intelijen Dasar), berupa *basic research* (penyelidikan dasar) dan *fundamental research* (penyelidikan lanjutan).
- b. *Current Reportional Form* atau bentuk laporan mengenai perkembangan yang sedang terjadi (aktual)¹⁵.

Teori – teori tersebut di atas menjadikan dasar bagi aparat intelijen untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data – data mengenai kemampuan, kelemahan, atau kerawanan dan kemungkinan cara bertindak musuh. Dalam kaitannya dengan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur di dan wilayah sekitarnya di perairan Selatan Sumatera Barat, yang dimaksud dengan musuh adalah semua pihak – pihak yang bermaksud melakukan ancaman,

¹³ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, (Penerbit Prenada Media Group: Jakarta, 2010).

¹⁴ Washington Platt, *Strategic Intelligence Production : Basic Principles*, (New York: F. A. Praeger, 1957), hlm. 302.

¹⁵ Sherman Kent, *Strategic Intelligence For American World Policy*, (New Jersey: Princeton University Press, 1953), hlm. 72.

gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keberlangsungan pengamanan Obvitnas tersebut oleh Lantamal II Padang.

Berdasarkan kondisi *existing* di Lantamal II Padang, ditemukan bahwa dalam aspek strategi intelijen secara umum strategi deteksi, penginderaan, dan pengamatan terhadap aspek maritim maupun Obvitnas yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti terbatasnya peralatan pendukung kerja intelijen dan personel pengawak organisasi yang belum memiliki kualifikasi intelijen. Selayaknya, strategi intelijen yang diharapkan di Lantamal II Padang agar berpedoman pada Keputusan Kasal No Kep/07/II/2001 tentang Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya”, yang memiliki 3 strategi, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

a. Strategi Penyelidikan Maritim.

Mencakup :

- 1) Kegiatan pengamanan laut,
- 2) Pendeteksian dan pengidentifikasian sasaran,
- 3) Mampu meneruskan laporan secara cepat.

b. Strategi Pengamanan. Mencakup :

1) Strategi mencegah dan menanggulangi setiap kerawanan serta kegiatan intelijen lawan/bakal lawan.

2) Strategi mencegah setiap usaha yang dapat merugikan personel, material, dokumen, dan kegiatan/operasi laut.

c. Strategi Penggalangan. Mencakup :

1) Strategi mempengaruhi sikap dan perilaku pihak tertentu untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi kepentingan pertahanan negara di laut.

2) Strategi memelihara dan meningkatkan potensi nasional untuk membantu terwujudnya daya tangkal kewilayahan yang dapat digunakan bagi kepentingan operasi – operasi TNI AL.

Kondisi strategi intelijen Lantamal II Padang yang diharapkan ke depan adalah intelijen yang profesional, di dukung SDM intelijen yang mumpuni akan tugas dan tanggung jawabnya, serta dilengkapi dengan peralatan pendukung kerja intelijen yang baik, agar dapat mengatasi segala kendala – kendala yang ada. Diharapkan visi intelijen dapat tercapai, yaitu terwujudnya fungsi intelijen TNI AL yang dapat mendukung tugas TNI AL melalui misi – misi intelijen, seperti

meningkatkan peran intelijen dalam rangka mendukung tugas TNI AL dan melaksanakan pembinaan intelijen AL dan intelijen maritim.

Apabila hal – hal yang menjadi harapan strategi intelijen Lantamal II Padang tersebut dapat tercapai. Dengan demikian akan memberikan kontribusi secara signifikan terhadap strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan pengamanan Obvitnas. Khususnya yang berada di wilayah kerjanya seperti Pelabuhan Teluk Bayur.

Aspek Strategi Pertahanan

Dalam kaitannya dengan tujuan dasar strategi militer, TNI AL memiliki dua fungsi dasar, yaitu pengendalian laut dan proyeksi kekuatan. Di mana terdapat hubungan saling kebergantungan di antara keduanya.

a. Pengendalian Laut. Pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di dan lewat laut, dan mampu secara optimal memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa sendiri, serta mampu mencegah/menghambat pemanfaatan

oleh bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan sendiri.

b. Proyeksi Kekuatan. Terbagi ke dalam :

1) Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut, yaitu penggunaan kapal – kapal TNI AL dan pasukan Marinir untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya keamanan di laut dan daerah penting lainnya.

2) Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekuatan darat dan udara, di mana spektrum yang lebih luas ini meliputi operasi amfibi, penggunaan pesawat angkut udara, bantuan tembakan kapal terhadap sasaran di darat, dalam mendukung kampanye udara dan darat.

Semua negara yang memiliki wilayah laut agar menyadari bahwa kedaulatannya sangat bergantung kepada strategi melakukan pengawasan secara fisik terhadap wilayah laut yang dikuasainya¹⁶. Dengan demikian harus disadari bahwa untuk menjaga kedaulatan suatu negara tergantung dari strategi pertahanannya¹⁷. Dalam hal pengamanan Obvitnas

¹⁶ Cornelis Van Bynkershoek, *De Dominio Maris Desertatio*, 1703.

¹⁷ Markas Besar TNI AL, *Gelar Kekuatan Di Wilayah Perbatasan Laut Dalam*

Mempertahankan Kedaulatan NKRI, (Jakarta: Mabes TNI AL, 2009), hlm. 10.

Pelabuhan Teluk Bayur dan daerah di sekitarnya di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat, jangan sampai tindakan pengamanan diambil alih oleh pihak negara asing maupun tenaga pengamanan swasta, karena menyangkut kedaulatan wilayah NKRI.

Berdasarkan kondisi *existing* di Lantamal II Padang seperti yang disampaikan dalam uraian di atas. Secara umum strategi pertahanan yang merupakan gabungan dari profesionalitas prajurit dan kesiapan Alutsista untuk melaksanakan kegiatan penegakan kedaulatan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang masih kurang optimal. Hal tersebut disebabkan minimnya unsur – unsur patroli yang ada dihadapkan dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawab Lantamal II Padang. Namun demikian untuk meningkatkan profesionalitas prajurit, Lantamal II Padang selalu melaksanakan kegiatan pembinaan latihan baik berupa teori di dalam ruangan/pencerahan, maupun latihan gabungan dengan instansi lainnya.

Lantamal II Padang juga melaksanakan Latihan Geladi Tugas Tempur dan latihan Pangkalan Tingkat 1 sampai dengan Tingkat 4, serta latihan F1QR/Pasukan Reaksi Gerak Cepat secara rutin setiap tri wulan. Hal ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan kesiapsiagaan Lantamal II Padang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokoknya. Lantamal II Padang juga melaksanakan Pembinaan Potensi Nasional Kekuatan Maritim guna meningkatkan kemampuan pertahanan pangkalan.

Selayaknya, strategi pertahanan laut yang diharapkan dapat dilaksanakan di Lantamal II Padang agar berpedoman kepada Keputusan Kasal No Kep/07/II/2001 tentang Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya”, yaitu memiliki strategi peperangan di atas permukaan, strategi peperangan di bawah permukaan, strategi proyeksi kekuatan ke darat, strategi K3I (Komando, Kendali, Komunikasi, dan Informasi), strategi peperangan elektronika dan strategi sabotase bawah air¹⁸. Kaitannya dalam melaksanakan kegiatan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah di sekitarnya di perairan Selatan

¹⁸ Markas Besar TNI AL, *Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya” (Keputusan Kasal No Kep/07/II/2001)*, (Jakarta, 2001), hlm. 69–75.

Sumatera Barat, hendaknya strategi pertahanan yang harus dimiliki oleh Lantamal II Padang adalah strategi sabotase bawah air. Di mana diharapkan dengan strategi ini dapat mengurangi atau menghancurkan kekuatan lawan secara tersembunyi guna menggagalkan segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap semua kepentingan nasional di dan atau lewat laut.

Dari apa yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa dalam hal ini Lantamal II Padang mengemban peran militer. Peran ini dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim. Seperti apa yang tercantum dalam asas peran universal AL berdasarkan sudut pandang dari teori Kent Booth¹⁹.

Aspek Strategi Pengamanan

Secara umum strategi pengamanan yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang adalah berupa patroli keamanan laut terbatas. Mengingat kondisi sarana patroli yang dimiliki saat ini ada yang tidak siap dan rata – rata sudah berusia pakai cukup lama. Sehingga kemampuan fisik sarana patroli tersebut sangat rentan dihadapkan dengan kondisi gelombang dan cuaca apabila terjadi kondisi buruk.

Terkait pengaman Obvitnas berdasarkan UU RI No 34 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 2 B Angka 5 bahwa TNI memiliki tugas untuk mengamankan Obvitnas yang bersifat strategis. Sedangkan Polri dapat meminta bantuan kekuatan berdasarkan Keppres RI No 63 Tahun 2004. Mengacu pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kerja sama antara TNI AL dengan PT. Pelindo II, berupa pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur.

Pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur oleh TNI AL ini termasuk ke dalam kategori Operasi Pengamanan Non Permanen Bersifat Khusus. Pelabuhan Teluk Bayur yang dikelola oleh PT. Pelindo II masih mengalami tindakan pencurian,

¹⁹ Kent Booth, *Navies And Foreign Policy*. (New York: Crane, Russak & Company Inc., 1977).

meskipun jumlahnya relatif rendah. Tindakan pencurian ini dilakukan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab. Strategi pengamanan laut yang diharapkan dapat dilaksanakan di Lantamal II Padang agar berpedoman pada Keputusan Kasal No Kep/07/II/2001 tentang Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya”. Yaitu : strategi memelihara stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi nasional, strategi menegakkan hukum di laut, dan strategi melaksanakan pengamanan Obvitnas di laut²⁰.

Upaya Lantamal II Padang dalam memperbaiki strategi pengamanan laut sering kali dihadapkan dengan adanya beberapa keterbatasan, antara lain dalam hal ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran menjadi penghambat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan yang direncanakan, karena harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Kaitannya dengan keterbatasan anggaran yang diterima oleh Lantamal II Padang sehingga mengalami kesulitan dalam menggerakkan unsur – unsur patroli. Akibat dari tidak melautnya kapal berdampak kepada keterampilan personel

(Anak Buah Kapal). *Skill* yang diberikan untuk membuat mereka *instinctive* melakukan sebuah operasi di kapal ikut menurun karena kebiasaan setiap hari latihan selama berada di laut dengan ombak yang memberikan tantangan.

Latihan bisa dilakukan di darat saat sandar, sehingga pada saat mereka ke laut insting mereka menghadapi cuaca, alam, dan lain sebagainya akan sedikit berbeda. Artinya, kendala yang ada agak signifikan terhadap profesionalisme atau *outcome* dari Lantamal II Padang. Keterbatasan anggaran mengakibatkan sektor patroli harus diatur secara ketat sesuai prioritas keamanan. Demikian halnya dengan penempatan personel di Pelabuhan Teluk Bayur yang hanya akan ditempatkan apabila mendapat informasi dari Tim Intelijen tentang adanya ancaman atau gangguan yang akan terjadi. Idealnya ada personel yang *stand by* untuk menjaga Pelabuhan Teluk Bayur.

Aspek Strategi Dukungan

Lanal memiliki tugas utama untuk mendukung seluruh kekuatan laut, menyediakan fasilitas berlabuh untuk kapal – kapal perang, menyediakan daerah

²⁰ Markas Besar TNI AL, *Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya” (Keputusan Kasal No Kep/07/II/2001)*, (Jakarta, 2001), hlm. 69–75.

lego jangkar, dan menyediakan fasilitas – fasilitas penunjang lainnya yang berkaitan dengan tugas – tugas operasi yang akan dilaksanakan oleh AL. Pangkalan juga harus memberikan fasilitas komunikasi yang diperlukan untuk keamanan lokal, dan juga harus memberikan dukungan administrasi dan logistik²¹.

Dalam rangka mendukung satuan operasi dalam melaksanakan tugas pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur. Seharusnya Lantamal yang disiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut selayaknya harus memiliki strategi dukungan yang memadai. Strategi dukungan yang dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kasal No Kep/07/III/2001 tentang Doktrin Angkatan Laut “Eka Sasana Jaya” adalah memiliki Faslabuh, Fasharkan, Fasbek, dan Faswatpers²².

Berdasarkan kondisi *existing* di Lantamal II Padang secara umum strategi dukungan Lantamal II Padang masih kurang optimal. Disebabkan adanya keterbatasan sebagai berikut: (1) Untuk Faslabuh Lantamal II Padang memiliki dermaga yang bisa digunakan untuk

mendukung operasional kapal – kapal TNI AL. Akan tetapi apabila ada KRI dengan ukuran besar (panjang +75 m) yang melakukan kunjungan, Lantamal II Padang saat ini menggunakan Faslabuh milik PT. Pelindo II unit Pelabuhan Teluk Bayur yang dipinjamkan kepada Lantamal II Padang. (2) Lantamal II Padang tidak memiliki Fasharkan. Untuk melaksanakan dukungan perbaikan kapal, Lantamal II Padang bekerja sama dengan pihak lain, yaitu PT. CMS Banten, PT. Palindo Marine Shipyard Batam, dan PT. Pelangi Indah Nusantara Jakarta. (3) Strategi dukungan Fasbek masih kurang memadai. Lantamal II Padang hanya memiliki gudang yang dipergunakan untuk tempat penyimpanan perbekalan umum. (4) Untuk mendukung kegiatan perawatan personel, Lantamal II Padang memiliki beberapa fasilitas yang sudah cukup memadai.

Strategi AL tidak hanya mengenai peperangan. Terdapat juga pengembangan taktik, logistik, komando, dan kendali pemerintah, komunikasi, kapal, senjata, dan aspek AL lainnya beserta teknologi. Kondisi demikian haruslah dapat dibenahi sehingga dapat

²¹ US Military, *The Department Of Defense Dictionary of Military And Associated Terms*, (Joint Publication, 2009, 1 – 20), hlm. 386.

²² Markas Besar TNI AL, *Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya”* (Keputusan Kasal NoKep/07/III/2001), (Jakarta, 2001), hlm. 69–75.

terwujud strategi dukungan yang memadai yang dimiliki oleh Lantamal II Padang untuk dapat melaksanakan tugas pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur yang dikelola oleh PT. Pelindo II dan wilayah sekitarnya di perairan Selatan Sumatera Barat.

Faktor strategi dukungan menjadi faktor yang tidak kalah penting dibandingkan dengan strategi – strategi lainnya. Karena menyangkut dengan ketahananlamaan dan keberlangsungan suatu operasi pengamanan yang dilakukan. Strategi dukungan yang dimiliki oleh Lantamal II Padang saat ini masih perlu ditingkatkan guna mendukung operasi pengamanan Lantamal II Padang dalam melaksanakan kegiatan pengamanan di Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di wilayah kerjanya. Peningkatan strategi dukungan tersebut harus dapat mendukung dan menunjang kebutuhan pelaksanaan kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Lantamal II Padang Dalam Pengamanan Obvitnas

Faktor Penghambat

a. SDM

Masih banyak kejadian di daerah terlambat untuk diketahui dan diantisipasi sejak awal membuktikan bahwa intelijen belum mampu melaksanakan deteksi dini dengan cermat diakibatkan kondisi SDM aparat intelijennya yang belum memadai dihadapkan pada tugas yang diembannya.

1) Kuantitas Personel Lantamal II Padang. Dalam pengisian organisasi intelijen TNI AL, secara keseluruhan jumlah personel terpenuhi 50,2% dari DSP yang dibutuhkan. Jumlah personel Lantamal II Padang saat ini sebanyak 1066 orang sedangkan sesuai dengan DSP seharusnya 2123 orang. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan terhadap pengawasan dan penempatan jabatan personel sesuai dengan kebutuhan. Menurut peneliti, kondisi demikian mengakibatkan tidak efisiennya anggaran dalam suatu organisasi, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kelengahan dalam pengawasan,

yang nantinya justru dapat menghambat peran pangkalan itu sendiri dalam melakukan pengamanan terhadap wilayah kerjanya. Kondisi demikian mengakibatkan gelar kekuatan dalam operasi pengamanan Obvitnas menjadi kurang optimal. Dengan kondisi kekurangan personel pada struktur organisasi Lantamal II Padang tersebut tetap akan berdampak pada pemerataan jumlah prajurit TNI AL secara umum, dan pastinya akan membebani anggaran perawatan personel organisasi TNI AL.

2) Kualitas Personel Lantamal II Padang. Kualitas aparat intelijen belum memadai dan belum mampu menjawab perkembangan situasi yang ada dalam menghadapi ancaman terhadap negara yang muncul saat ini. Kualitas personel Lantamal II Padang yang ada masih belum dapat bekerja secara maksimal untuk melaksanakan kegiatan deteksi dini dan cegah dini serta lapor cepat. Hal ini dapat mengakibatkan pola penindakan yang tidak terlaksana dengan metode yang tepat dan dalam waktu yang cepat.

Solusi yang dapat ditempuh terhadap SDM agar Lantamal II Padang memiliki strategi yang mumpuni dalam pengamanan Obvitnas untuk menghadapi setiap ancaman terhadap kepentingan nasional di dan atau lewat laut. Diperlukan peningkatan kualitas personel sehingga terpenuhi sesuai kebutuhan organisasi. Pembinaan kuantitas dan kualitas personel Lantamal II Padang melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

a) Pembinaan Awal. Proses untuk mendapatkan kualitas SDM yang mumpuni harus diawali dengan metode rekrutmen yang benar dengan standar tertentu terhadap anggota TNI AL.

b) Pembinaan Lanjutan. Untuk membekali personel agar memiliki kemampuan sesuai dinamika di lapangan baik secara teknik, taktik, maupun kemampuan akademik dilakukan melalui pendidikan lanjutan dan latihan keterampilan agar terjadi peningkatan kualitas SDM sesuai kebutuhan organisasi.

c) Penggunaan. Melaksanakan penugasan bagi personel secara bergantian dalam kegiatan rutin atau penugasan operasi, sesuai kebijakan pimpinan TNI AL “tour of

duty” dan “*tour of area*”, untuk meningkatkan profesionalisme. Dalam pelaksanaannya agar senantiasa dilakukan monitoring terhadap personel di lapangan yang dilakukan secara obyektif. Sehingga dapat diketahui personel yang bisa digunakan dan terukur dedikasinya serta loyalitasnya.

b. Sarana dan Prasarana

1) Kuantitas sarana patroli yang dimiliki oleh Lantamal II Padang sangat terbatas jumlahnya jika dihadapkan dengan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Kondisi demikian mengakibatkan terbatasnya pelaksanaan operasi patroli di laut, yang ditujukan untuk menangkal terjadinya berbagai macam bentuk pelanggaran di laut. Salah satunya adalah aktivitas yang membahayakan obyek – obyek vital. Menurut peneliti, kondisi demikian sangat mempengaruhi kinerja Lanal dalam melakukan pengamanan obyek vital. Sebagaimana tercantum dalam tugas TNI AL pada UU RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 9 yang menyebutkan tentang menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan

hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Peneliti menafsirkan, obyek vital di sini sebagai obyek yang menjadi sumber pemasukan untuk negara dan sarana distribusi dengan nilai ekonomis tinggi yang sangat mempengaruhi keamanan nasional, dan juga kapasitas elemen – elemen yang berperan dalam menciptakan kondisi keamanan.

2) Kualitas sarana patroli yang ada belum dapat bekerja secara maksimal untuk melaksanakan kegiatan patroli karena kondisi sudah cukup tua secara rata – rata usia. Kondisi ini sangat mempengaruhi pola operasi yang dilakukan dihadapkan pada karakteristik medan operasi (Samudera Hindia). Menurut peneliti faktor tersebut dapat mengurangi pula peran Lantamal II Padang dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap obyek vital, sehingga akan mengurangi kualitas peran polisionil (*constabulary*) sebagaimana

disebutkan dalam teori Kent Booth²³.

Strategi dukungan Lantamal II Padang masih kurang optimal berdampak terhadap tugas dan kewajiban sebagai Lanal dalam mendukung seluruh kekuatan laut, menyediakan Faslabuh untuk kapal – kapal perang, menyediakan daerah lego jangkar, menyediakan fasilitas penunjang lainnya yang berkaitan dengan tugas – tugas operasi yang akan dilaksanakan oleh AL.

c. Keterbatasan Anggaran

Dasar dalam kegiatan pengamanan Obvitnas yang dilakukan oleh TNI AL di Lantamal II Padang berpedoman kepada Keputusan Kasal No Kep/1808/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Obvitnas oleh TNI AL (PUM-5.115) yang menyebutkan bahwa dukungan logistik Operasi Pengamanan Non Permanen Obvitnas oleh TNI AL dalam Pengamanan Bersifat Khusus, seperti Pelabuhan Teluk Bayur yang dikelola oleh PT. Pelindo II dan wilayah sekitarnya di perairan Selatan Provinsi

Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Dukungan bekal awal dan bekal ulang operasi menjadi tanggung jawab *stakeholder* (pengelola Obvitnas).
- 2) Dukungan pemeliharaan dan perbaikan Alutsista menjadi tanggung jawab Markas Besar TNI AL.

Ketersediaan anggaran pengamanan yang dialokasikan oleh PT. Pelindo II unit Pelabuhan Teluk Bayur sangat menentukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pengamanan di Pelabuhan Teluk Bayur itu sendiri, karena anggaran adalah salah satu kunci dari implementasi total kekuatan dalam gelar pengamanan. Dalam menentukan jumlah anggaran pengamanan tersebut sangat bergantung pada kemampuan keuangan PT. Pelindo II selaku pengelola Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di perairan Selatan Provinsi Sumatera Barat. Pelabuhan Teluk Bayur adalah aset PT. Pelindo II yang termasuk ke dalam wilayah kerja Lantamal II Padang. Dalam

²³ Kent Booth, *Navies And Foreign Policy*, (New York: Crane, Russak & Company Inc., 1977).

pengamanannya dilaksanakan oleh PT. Pelindo II bekerja sama dengan Lantamal II Padang. Lantamal II Padang hanya dapat melaksanakan pengamanan apabila ada permintaan dari pihak PT. Pelindo II, dan juga apabila ada informasi tentang status kerawanan yang meningkat dari Tim Intelijen. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran pengamanan, sehingga kegiatan operasi pengamanan tidak bisa dilakukan secara terus – menerus.

Faktor Pendukung

a. Faktor Payung Hukum

Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah sekitarnya di perairan Barat Pulau Sumatera. Mengacu pada peraturan – peraturan dan perundang – undangan RI yang berlaku. Hal tersebut menjadi dasar hukum bagi TNI AL dalam melaksanakan tugas pengamanan Obvitnas. Dasar kebijakan bagi TNI AL dalam hal ini Lantamal II Padang dalam melaksanakan pengamanan Obvitnas di wilayah kerjanya berupa Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah sekitarnya di perairan Selatan Sumatera Barat adalah Keputusan Kasal No Kep/1808/XII/2013

tanggal 31 Desember 2013. Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Obvitnas oleh TNI AL (PUM-5.115). Dalam kebijakan tersebut memberikan petunjuk dan pedoman bagi Satker di lingkungan TNI AL dalam menyelenggarakan operasi pengamanan Obvitnas agar penyelenggaraannya dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal. Perumusan kebijakan pengamanan Obvitnas tersebut disusun berdasarkan ketentuan hukum penyelenggaraan pengamanan Obvitnas, yaitu :

1) UU RI No 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang TNI.

a) Bab IV Pasal 7 Ayat 2 B Angka 5 tentang tugas pokok TNI dalam OMSP menyebutkan salah satu tugas pokok TNI dalam OMSP adalah mengamankan Obvitnas yang bersifat strategis.

b) Bab IV Pasal 7 Ayat 3 ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1) dilaksanakan berdasarkan keputusan politik negara.

c) Pasal 9 Huruf B salah satu tugas TNI AL adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional,

sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

2) Keppres RI No 63 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang pengamanan Obvitnas.

a) Pengelola Obvitnas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obvitnas masing – masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.

b) Polri berkewajiban memberikan bantuan pengamanan terhadap Obvitnas.

c) Dalam melaksanakan pengamanan obvitnas, Polri dapat meminta bantuan kekuatan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa Polri dapat meminta bantuan kepada TNI. Akan tetapi bukan berarti TNI harus menunggu permintaan Polri apabila menemukan pihak – pihak tertentu bermaksud untuk mengganggu dan mengancam keamanan Obvitnas yang bersifat strategis.

d) Pengamanan Obvitnas yang merupakan bagian organik atau

termasuk dalam lingkungan TNI dilakukan oleh TNI.

Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum, penyelenggaraan kegiatan pengamanan Obvitnas yang dilaksanakan oleh TNI AL di Lantamal II Padang di wilayah kerjanya telah memiliki payung hukum dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Faktor hukum yang menjadi faktor yang menguntungkan ini harus bisa dimanfaatkan oleh Lantamal II Padang untuk dapat melaksanakan tugas – tugas pengamanan tersebut secara maksimal. Karena sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pembagian tugas – tugas antara unsur – unsur pelaksana harus dapat menjalankan tugas, peran, dan fungsi masing – masing dalam berupaya melaksanakan tugas dengan baik. Karena semuanya telah diatur dengan baik dalam Keputusan Kasal No Kep/1808/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Obvitnas oleh TNI AL (PUM-5.115).

b. Faktor Lingkungan Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Sehingga diperoleh

kepatuhan terhadap hukum dari perilaku masyarakat yang bertujuan mencapai terjadinya kedamaian di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dalam lingkup yang dimaksud dengan faktor masyarakat dalam pembahasan tulisan ini adalah seluruh *stakeholder* yang berperan dalam menjaga stabilitas keamanan di sekitar Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur, yang terdiri dari TNI/Polri, Pemda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat nelayan di sekitar lokasi Obvitnas.

Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh TNI AL berupa program pembinaan desa pesisir perlu mendapat dukungan dari semua *stakeholder*. Sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat lebih berkembang untuk menumbuhkan kesadaran bela negara bagi masyarakat pesisir. Apabila hal ini dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh *stakeholder* maritim, sudah barang tentu akan mendapatkan hasil yang optimal. Masyarakat pesisir akan mendapatkan hasilnya dalam bentuk adanya peningkatan kesejahteraan dan pendidikan. Pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah sekitarnya di pantai Selatan Sumatera

Barat harus dilakukan secara sinergi dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada melibatkan secara langsung masyarakat dan instansi terkait melalui kerja sama – kerja sama.

Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan melibatkan sektor swasta, pemerhati lingkungan, para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sehingga dapat berjalan secara terpadu. Pemberdayaan masyarakat kawasan pantai di sekitar Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan dapat terlaksana seperti apa yang diharapkan, yaitu laut yang terbebas dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan masyarakat setempat menjadi faktor yang menguntungkan bagi Lantamal II Padang dalam melaksanakan kegiatan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur di wilayah kerjanya. Selama ini kegiatan tersebut telah mendapatkan dukungan dari seluruh *stakeholder* yang ada, seperti instansi TNI/Polri, Pemda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh

agama, dan masyarakat nelayan setempat.

c. Faktor Kebudayaan

Nilai – nilai kebudayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat dan lingkungan serta seluruh *stakeholder* dapat secara bersama – sama menumbuhkan MDA. Nilai – nilai kebudayaan ini sejalan dengan visi misi pemerintah untuk dapat mewujudkan Poros Maritim Dunia di wilayah NKRI. Pembangunan MDA akan mampu meningkatkan kepedulian seluruh instrumen negara dalam berbagai sektor terhadap lingkungan maritim. Melalui kepedulian tersebut diharapkan akan ikut meningkatkan stabilitas keamanan maritim. Selama ini masyarakat maritim di sekitar wilayah perairan Selatan Sumatera Barat sangat peduli terhadap keamanan di lingkungannya masing – masing. Budaya lapor dan peduli terhadap lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat maritim apabila menemukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum sangatlah membantu aparat keamanan. Termasuk Lantamal II Padang dalam melaksanakan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan sekitarnya

di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kondisi nyata (*existing condition*) strategi Lantamal II Padang dalam pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah sekitarnya di perairan Selatan Sumatera barat secara umum masih belum optimal. Hal ini dilihat dari keempat elemen strategi yang dimiliki oleh Lantamal II Padang saat ini adalah sebagai berikut : Strategi intelijen dalam melaksanakan deteksi, penginderaan, dan pengamatan terhadap aspek maritim maupun Obvitnas masih sangat terbatas, disebabkan kurangnya sarana peralatan pendukung kerja intelijen seperti belum memiliki radar dan personel pengawak organisasi yang kurang dan belum sesuai DSP. Strategi pertahanan yang merupakan gabungan dari profesionalitas prajurit dan kesiapan Alutsista untuk melaksanakan kegiatan penegakan kedaulatan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI belum terlaksana secara maksimal, disebabkan minimnya unsur – unsur

patroli yang ada dihadapkan dengan luasnya wilayah kerja. Strategi pengamanan karena minimnya unsur yang ada tidak sesuai dengan luas wilayah kerja sehingga hanya mampu untuk melaksanakan patroli keamanan laut secara terbatas, demikian pula dengan kondisi sarana patroli yang dimiliki usia pakainya rata – rata sudah cukup tua, sehingga kemampuan fisik sarana patroli tersebut sangat rentan dihadapkan dengan kondisi gelombang dan cuaca buruk. Strategi dukungan Lantamal II Padang dalam mendukung operasi masih kurang memadai, disebabkan adanya beberapa keterbatasan yaitu tidak memiliki Faslabuh untuk unsur besar (panjang + 75 m), tidak memiliki Fasharkan, Fasbek yang masih kurang memadai, dan Faswatpers yang cukup lengkap.

- b. Faktor – faktor yang mempengaruhi strategi Lantamal II Padang dalam pengamanan Obvitnas di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat terdiri atas faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat yaitu : Secara kuantitas jumlah personel yang ada belum mencapai DSP sehingga banyak yang tidak memiliki tanggung jawab sesuai porsi jabatannya. Kualitas personel Lantamal II Padang secara

umum belum mampu melaksanakan kegiatan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur. Kuantitas dan kualitas sarana patroli yang ada di Lantamal II Padang belum mampu untuk menghadapi ancaman faktual dan potensial dihadapkan luasnya wilayah kerja. Keterbatasan anggaran pengamanan hanya bisa untuk melaksanakan pengamanan Obvitnas secara terbatas di Pelabuhan Teluk Bayur. Faktor pendukung yaitu : Sudah adanya payung hukum yang mengatur TNI AL (Lantamal II Padang) untuk melaksanakan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah sekitarnya di perairan Selatan Sumatera Barat. Adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menjaga stabilitas keamanan di sekitar Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur, terdiri dari TNI/Polri, Pemda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat nelayan di sekitar lokasi Obvitnas. Adanya budaya positif dari lingkungan berupa kesadaran MDA dalam menjaga lingkungan maritim di sekitarnya, sehingga turut dalam menciptakan stabilitas keamanan di perairan sekitar Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur.

Referensi

Buku

- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Booth, Kent. 1977. *Navies And Foreign Policy*. New York: Crane, Russak & Company Inc.
- Bynkershoek, Cornelis Van. 1703. *De Dominio Maris Desertatio*.
- Kent, Sherman. 1953. *Strategic Intelligence For American World Policy*. New Jersey: Princeton University Press. Halaman 72.
- Koentjaningrat. 1993. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia. Halaman 89.
- Markas Besar TNI AL. 2001. *Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya” (Keputusan Kasal No Kep/07/III/2001)*. Jakarta. Halaman 69 – 75.
- Markas Besar TNI AL. 2009. *Gelar Kekuatan Di Wilayah Perbatasan Laut Dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI*. Jakarta. Halaman 10.
- Platt, Washington. 1957. *Strategic Intelligence Production: Basic Principles*. New York: F. A. Praeger. Halaman 302.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Penerbit Prenada Media Group: Jakarta.
- Till, Geoffrey. 2009. *Seapower: A Guide for 21st Century Second Edition*. London: Routledge Publishing. Halaman 24.
- US Military. 2009. *The Department Of Defense Dictionary Of Military And*

Associated Terms. Joint Publication. 1 – 20. Halaman 386.

Jurnal

- Douglas D., Gary Cutter, & Christopher Bever. 2015. *The VHA Multiple Sclerosis Surveillance Registry (MSSR) and it’s Similarities with Other Contemporary MS Cohorts*. *The Journal of Rehabilitation Research and Development*. 52. 263-272. 10.1682/JRRD.2014.07.0172.

Perundang – Undangan

- Kepmen ESDM No. 3407 Tahun 2012.
- Keppres RI No 63 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang pengamanan Obvitnas.
- Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Website

- Aliy. 2016. *Disnav Teluk Bayur Optimalkan Sarana dan Prasarana Untuk Tingkatkan Kinerja*. Beritatrans. (Online). beritatrans.com/2016/09/04/disnav-teluk-bayur-optimalkan-saranadan-prasarana-untuk-tingkatkan-kinerja/ Diakses pada Tanggal 13 Juni 2018 Pukul 16.30 WIB.
- International Maritime Organization. Profile. (Online). <https://business.un.org/en/entities13> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pukul 14.00 WIB.

Madani, Mohamad Amin dan Sapto Andika Candra. 2017. *CPO 3 Ribu Ton Tumpah Ke Laut, Teluk Bayur Tercemar*. Republika. (Online). https://m-republika-coid.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp_version/owzhwm283?amp_js_v=a1&_gsa=1&usqp=mq331AQCCA=#amp_tf=from%20%251%24s Diakses pada Tanggal 13 Juni 2018 Pukul 17.30 WIB.

Sulaeman, Agus. 2017. *Jaga Fisik Prajurit, Danlantamal II Pimpin Long March*. Channel Indonesia. (Online). <https://channelindonesia.com/2017/12/27/jaga-fisik-prajurit-danlantamal-ii-pimpinlong-march/> Diakses pada Tanggal 17 Juni 2018 Pukul 11.30 WIB.

